
SOSIALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Veronika Saragih¹ Nikson Sitindaon² Yustina Evelina Derita³

Akademi Maritim Belawan¹ STIE Bina Karya Tebing Tinggi² Akademi Maritim Belawan³

veronicasrgh@gmail.com¹ sitindaonnikson@gmail.com² yustinaevelina@gmail.com³

Kota Medan, Indonesia

ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan krusial yang menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam upaya pencegahannya, pendidikan menjadi instrumen strategis untuk membentuk karakter dan integritas generasi muda. Sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini melalui sistem pendidikan formal maupun nonformal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses, tantangan, serta efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada sejumlah institusi pendidikan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan guru, integrasi materi antikorupsi dalam kurikulum, dan kampanye publik, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya pemahaman tenaga pendidik dan rendahnya partisipasi aktif peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, guna menciptakan budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Kata kunci: pendidikan, antikorupsi, sosialisasi, kebijakan, integritas.

ABSTRACT

Corruption is a crucial problem that hinders national development and undermines the very foundations of national and state life. In preventing it, education is a strategic instrument for shaping the character and integrity of the younger generation. The dissemination of anti-corruption education policies aims to introduce and instill anti-corruption values from an early age through both formal and non-formal education systems. This study aims to analyze the process, challenges, and effectiveness of the dissemination of anti-corruption education policies in schools and the community. The method used is a qualitative descriptive study, with data collected through observation, interviews, and documentation at several educational institutions. The results indicate that although dissemination has been carried out through various programs such as teacher training, integration of anti-corruption materials into the curriculum, and public campaigns, implementation in the field still faces obstacles, such as a lack of understanding among educators and low active student participation. Therefore, a stronger commitment is needed from all parties, including the government, educational institutions, and the community, to create a sustainable anti-corruption culture.

Keywords: education, anti-corruption, dissemination, policy, integrity .

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan moral, hukum, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan.



Salah satu strategi yang dianggap efektif dalam jangka panjang adalah melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, etika, dan integritas generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Menyadari pentingnya hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah merumuskan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk integrasi materi antikorupsi dalam kurikulum, pelatihan pendidik, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan edukatif di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada proses **sosialisasi** yang dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat luas. Sosialisasi menjadi langkah awal yang penting agar semua pihak memahami substansi kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, serta peran yang harus dijalankan masing-masing.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi dilakukan di lingkungan pendidikan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses sosialisasi tersebut?
3. Bagaimana efektivitas sosialisasi kebijakan tersebut dalam membentuk sikap dan pemahaman antikorupsi di kalangan pelajar dan masyarakat?

Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan proses sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi di lingkungan pendidikan.
2. Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi.
3. Menganalisis dampak sosialisasi terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai antikorupsi.

Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat strategi sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi serta menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merancang pendekatan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pendidik dan kepala sekolah di tingkat SMP dan SMA, diketahui bahwa proses sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi telah dilakukan melalui berbagai metode. Di antaranya adalah: _____



1. Workshop dan pelatihan guru, yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan lembaga mitra antikorupsi seperti KPK.
2. Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam mata pelajaran, khususnya PPKn, agama, dan bahasa Indonesia.
3. Kegiatan ekstrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila yang mengangkat tema kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
4. Pemasangan poster, slogan, dan media edukatif lainnya di lingkungan sekolah.

Namun, pelaksanaan sosialisasi ini belum merata di semua daerah. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih aktif dalam pelaksanaan program, sementara sekolah di daerah terpencil masih menghadapi kendala akses informasi dan sumber daya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman tenaga pendidik terhadap isi dan tujuan kebijakan, terutama di sekolah-sekolah yang belum mendapatkan pelatihan secara langsung.
2. Keterbatasan materi pembelajaran antikorupsi yang terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum.
3. Minimnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam penguatan nilai antikorupsi di luar lingkungan sekolah.
4. Pandangan skeptis sebagian pihak yang menganggap pendidikan antikorupsi hanya bersifat formalitas dan belum menyentuh akar permasalahan.

Meskipun masih terdapat berbagai kendala, sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi mulai menunjukkan dampak positif. Beberapa indikator efektivitas yang ditemukan di lapangan antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran siswa akan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
2. Adanya inisiatif siswa dalam mengembangkan proyek-proyek bertema antikorupsi, seperti deklarasi integritas kelas, gerakan kantin jujur, dan lomba poster antikorupsi.
3. Perubahan perilaku guru dan siswa dalam hal transparansi penggunaan dana kegiatan sekolah.

Namun, efektivitas jangka panjang dari sosialisasi ini masih perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar program ini tidak berhenti hanya pada tataran simbolik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sosialisasi kebijakan pendidikan anti korupsi merupakan langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada generasi muda melalui jalur pendidikan.
2. Proses sosialisasi telah dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti pelatihan guru, integrasi dalam kurikulum, serta kegiatan edukatif di sekolah. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum merata dan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman pendidik, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan hambatan dalam implementasi di daerah tertentu.
3. Secara umum, sosialisasi kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif dalam membangun kesadaran antikorupsi di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Namun, agar efektivitasnya dapat berkelanjutan, diperlukan penguatan dalam aspek pelatihan, dukungan sumber daya, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya dikenalkan secara formal, tetapi harus menjadi bagian dari budaya dan praktik nyata di lingkungan pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). *Panduan Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum*. Jakarta: Kemendikbud.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Suteki, & Taufani, D. A. (2018). Pendidikan Antikorupsi: Konsep, Strategi, dan Implementasi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 145–158.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PenMaRim

Vol 3, No 1 2025

- Widoyoko, E. P. (2011). *Pendidikan Antikorupsi: Strategi Membangun Integritas Bangsa*. Yogyakarta: LKiS.
- Zamroni. (2020). Peran Pendidikan dalam Membangun Budaya Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 25(3), 305–314.



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.